

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003).
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017).
- I wayan Parthiana, dkk. *Kajian tentang Kesenjangan antara United Nations Convention Against Transnational organized crime dengan Peraturan perundang-undangan Indonesia*. (UNTOC GAP Analysis), (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2010).
- Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2010).
- Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).
- Karhi Nisjar, Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2015).
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (buku kelima) Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*, (Jakarta: 2007).

- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010.
- Materi Kuliah Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. dalam mata kuliah *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Semarang 5 September 2023.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010).
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*, (Rangrang Education, 2012).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020).
- Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Robert D Purshley, *Introduction to Criminal Justice*, (New York: Macmillan Publishing, 1977).
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Press, 2015).

- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: CV Mandar Maju), halaman 138.
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1997).
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010).
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008).
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang

bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011,PER-045/A/JA/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

**Jurnal:**

Aprilia Krisdayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Lex Renaissance, Volume 7, No. 4 (Oktober, 2022).

Bambang Sugiri, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Narapidana Sebagai Justice Collaborator*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 51 No. 3 (2021).

Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No.1 (Januari 2017).

Batavia Putri, *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*,\_Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume VI No.2 Juli – Desember 2019.

Coby Elisabeth Mamahit, *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama*, Jurnal Lex Crimen Vol. V, Nomor 6 (Agustus, 2016).

Denny Ateng Prakoso, *Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Volume 3, Nomor 1 (Januari, 2020).

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 no 2 (Desember 2018).

- Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. RECHTSCIENTIA  
Jurnal Mahasiswa Hukum. (Karawang:UBP Karawang, 2023).
- Gorby Zefanya Tahitu, *Keberadaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen. Vol IV, Nomor 1 (Januari-Maret, 2015).
- Irfan Maulana Muharikin. *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*. Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015)
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, nomor 0852-01, (1 Juni, 2020).
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 (Juli, 2014).
- Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol III Nomor 8 (Januari-Juni 2016).
- Muhammad Junaidi, dkk. *Peran Lembaga Perlindungan Khusus Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Perlindungan Justice Collaborator pada Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat*. Jurnal Tahkim. Vol XIX, No. 1 (Juni, 2023).
- M. Iman Santoso. *Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, MMH, Jilid 41 No.3 (Juli, 2012)
- Rahman Amin, *Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, Vol.6 No. 2 (Desember, 2020).
- Ratih Arnisa, *Analisis Yuridis Perlindungan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023).

Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal Article, Ius Quia Iustum (2015).

SAMSURI, *Rekonstruksi Regulasi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang, 2023).

Sigit Artantojati. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012).

Supriyadi Widodo Eddyuno, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia*, Journal Article, Jurnal LPSK.

**Website:**

Tim Kompas.com. "Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK"

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/14/15135571/pengacara-bharada-e-sebut-ajukan-5-bentuk-perlindungan-ke-lpsk?page=all>

Dewan Perwakilan Republik Indonesia. "RUU Tentang Hukum Acara Pidana."

<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/62>

Detiknews. "Bharada E Berharap keluarganya Juga Diberikan Perlindungan Oleh LPSK"

<https://news.detik.com/berita/d-6234099/bharada-e-berharap-keluarganya-juga-diberikan-perlindungan-oleh-lpsk>

Kompas.com, "Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di kasus Brigadir J, Apa saja keuntungannya?"

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/165661/bharada-e-hendak-jadi-justice-collaborator-di-kasus-brigadir-j-apa-saja>

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Kepolisian Nasional.

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-14-29993ee8bb42ce743033bc4c422af545.pdf>

Nurhadi, “Inilah 4 kasus besar yang terbongkar karena *bantuan justice collaborator*”,Tempo.co, 11 Agustus, 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>

<https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/>

Ruth Meliana Dwi Indriani. “Bentuk-bentuk Perlindungan LPSK yang Bisa Diterima Bharada Eliezer.”

<https://suara.com/news/2022/08/10/182905/bentuk-bentuk-perlindungan-lpsk-yang-bisa-diterima-bharada-eliezer>

Nurhadi. “Inilah Perlindungan yang Didapat Bharada E setelah Berstatus *Justice Collaborator*”

<https://nasional.tempo.co/read/1623476/inilah-perlindungan-yang-didapat-bharada-e-setelah-berstatus-justice-collaborator>